



Pro Dan Kontra Kebijakan Sekolah Pada Siswa Yang Membawa Hp Di Sekolah MAS Nur Adia

Lutfhia Farhana Putri Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email : lutfhialubiss@gmail.com

Muhammad Kurniawan Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email : kurniawanlubies71@gmail.com

Salisa Afany

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email : Salisaafany1@gmail.com

Korespondensi penulis: lutfhialubiss@gmail.com.

Abstract. *This article discusses the pros and cons of education, which can occur due to various factors, such as differences in views, interests and experiences. Apart from that, pros and cons also occur in educational policies, such as the policy of eliminating thesis as a requirement for student graduation. National education policy in Indonesia aims to maintain consistency in education and ensure that the policy is in line with other policies. In the context of education policy, there are often differences in views and concerns of the community. Education policy has several functions, such as being a guide to action, directing activities in education or organizations, and maintaining consistency in education. This article uses qualitative research methods. Qualitative research methods can be understood as research procedures that utilize descriptive data in the form of written or spoken words from people and actors who can be observed. The aim of this descriptive research is to create a systematic, factual and accurate description, picture or painting of the facts, characteristics and relationships between the phenomena being investigated or an interview guide or questionnaire or documentary guide, according to the method used.*

Keywords: Policy, Education, Pros, Cons.

Abstrak. Tulisan ini membahas tentang Pro dan kontra pada pendidikan, yang bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti perbedaan pandangan, kepentingan, dan pengalaman. Selain itu, pro dan kontra juga terjadi pada kebijakan pendidikan, seperti kebijakan penghapusan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa. Kebijakan pendidikan Nasional di Indonesia bertujuan untuk menjaga konsistensi dalam pendidikan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan lainnya. Dalam konteks kebijakan pendidikan, sering terjadi perbedaan pandangan dan kekhawatiran masyarakat. Kebijakan pendidikan memiliki beberapa fungsi, seperti menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi, dan menjaga konsistensi dalam pendidikan. Artikel ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang dipergunakan.

Kata kunci: Kebijakan, Pendidikan, Pro, Kontra.

LATAR BELAKANG

Pendidikan memainkan peran krusial dalam meningkatkan martabat dan posisi bangsa Indonesia. Pemerintah terus berupaya mengembangkan sistem pendidikan yang unggul, mengutamakan kualitas melalui perbaikan bertahap serta peningkatan berkesinambungan. Tujuan utama adalah menggali potensi generasi saat ini melalui penerapan teknologi, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik dan mendukung percepatan kemajuan pendidikan di Indonesia. Upaya ini dilakukan dengan tujuan mewujudkan standar pendidikan yang lebih baik, mengampanyekan integritas, dan mendukung pencapaian tujuan cerdas kehidupan bangsa. Dengan sifat dinamisnya, sistem pendidikan di Indonesia terus beradaptasi dan melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik.

Dalam hal kebijakan pendidikan pro dan kontra adalah hal yang biasa terjadi dalam setiap kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun begitu, pemerintah bisa memberikan penjelasan yang dibutuhkan masyarakat. Pro dan kontra juga terjadi dalam pembuatan produk kebijakan publik. Contoh lain dari pro dan kontra kebijakan adalah kebijakan penghapusan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim. Selain itu, kebijakan pelayanan publik wajib sertifikasi vaksin di Kota Pekanbaru juga menuai pro dan kontra.

Pro dan kontra pada pendidikan bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti perbedaan pandangan, kepentingan, dan pengalaman. Selain itu, pro dan kontra juga terjadi pada kebijakan pendidikan, seperti kebijakan penghapusan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa. Kebijakan pendidikan Nasional di Indonesia bertujuan untuk menjaga konsistensi dalam pendidikan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan lainnya. Dalam konteks kebijakan pendidikan, sering terjadi perbedaan pandangan dan kekhawatiran masyarakat. Kebijakan pendidikan memiliki beberapa fungsi, seperti menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi, dan menjaga konsistensi dalam pendidikan.

Pro dan kontra adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap suatu hal atau kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pro berarti setuju, sedangkan kontra berarti tidak setuju atau menentang. Pro dan kontra sering terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam teks diskusi, kebijakan publik, produk kebijakan publik, dan lain-lain. Perbedaan pandangan dan kepentingan masyarakat dapat menjadi penyebab terjadinya pro dan kontra dalam suatu hal atau kebijakan (Sirojudin, 2019).

Perubahan-perubahan kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan Indonesia malah mempersurut kualitas pendidikan yang ada. Ketika melihat lagi

kepada lapangan pekerjaan dan tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM) Indonesia sendiri jarang memuaskan. Hal itu disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan Indonesia antara lain dalam masalah efektifitas, efisiensi dan standarisasi. Efektifitas pendidikan di Indonesia dinilai sangat rendah, karena salah satu penyebabnya adalah sistem pendidikan yang terus berganti-ganti yang akhirnya menyebabkan tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas, sehingga peserta didik dan pendidik tidak tau apa tujuan yang akan dihasilkan dan tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan yang ada (Thabrani, 2011).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang dipergunakan. Analisis data dipenelitian kualitatif dimaknai sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pro dan Kontra Kebijakan Pendidikan

Pro dan kontra adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap suatu hal atau kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pro berarti setuju, sedangkan kontra berarti tidak setuju atau menentang. Pro dan kontra sering terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam teks diskusi, kebijakan publik, produk kebijakan publik, dan lain-lain. Perbedaan pandangan dan kepentingan masyarakat dapat menjadi penyebab terjadinya pro dan kontra dalam suatu hal atau kebijakan (Sirojudin, 2019).

Dalam pendidikan, “pro” Merujuk pada argumen atau perspektif yang mendukung atau mendukung suatu kebijakan, program, atau elemen tertentu dari sistem pendidikan. Pendukung pro biasanya melihat suatu tindakan atau kebijakan tertentu sebagai keuntungan atau nilai tambah.

Sedangkan Kontra dalam konteks pendidikan mengacu pada argumen atau pandangan yang menentang atau memiliki keberatan terhadap suatu kebijakan, program, atau aspek

tertentu dalam dunia pendidikan. Pihak yang berpendapat "kontra" umumnya melihat dampak negatif atau risiko dari tindakan atau kebijakan tersebut.

Pro dan kontra dalam konteks kebijakan pendidikan merujuk pada beragam pandangan yang muncul terkait kebijakan-kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan seringkali menimbulkan tanda tanya bahkan kontroversi pro dan kontra di tengah masyarakat dan dunia pendidikan. Pandangan pro menunjukkan persetujuan terhadap kebijakan tersebut, sementara pandangan kontra menunjukkan ketidaksetujuan atau penentangan terhadap kebijakan tersebut. Perbedaan pandangan ini dapat muncul akibat beragam faktor, seperti perbedaan nilai, kepentingan, dan pengalaman masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan penghapusan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat (Naufal, 2023).

Oleh sebab itu, untuk memperbaiki kesenjangan-kesenjangan tersebut, diharapkan agar pemerintah dapat lebih selektif lagi dalam membuat suatu kebijakan sebelum menerapkannya. Diharapkan juga pemerintah dapat mempertimbangkan aspek-aspek penting lainnya seperti pemerataan sarana dan prasarana, kesejahteraan dan mutu pengajar, pemerataan kesempatan bersekolah, dampak psikologis, efektifitas serta mutu yang akan dihasilkan sebelum menerapkan suatu kebijakan (Ash-Shiddiqy, 2017).

B. Pengaruh Pro dan Kontra Pada Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan nasional seringkali menimbulkan tanda tanya dan bahkan kontroversi pro dan kontra di masyarakat dan dunia pendidikan karena berbagai alasan, seperti perbedaan pendapat, kepentingan, dan pengalaman masyarakat. Selain itu, standarisasi pendidikan di Indonesia dianggap rendah karena fokusnya pada hasil daripada proses dan materi pelajaran.

Pengaruh pro dan kontra kebijakan pendidikan dapat terjadi pada berbagai aspek pendidikan, seperti konsistensi dalam pendidikan, kualitas pendidikan, dan kesadaran masyarakat (Hilal, 2012). Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

1. **Konsistensi dalam pendidikan:** Kebijakan pendidikan yang tidak konsisten dapat menyebabkan kesenjangan dalam pendidikan. Misalnya, perubahan kurikulum pendidikan Indonesia sering kali terjadi seiring perubahan pemerintahan, yang menyebabkan ketidaksetaraan dan kesulitan dalam menyesuaikan diri.
2. **Kualitas pendidikan:** Kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan kesiapan peserta didik dan keterbatasan sumber daya dapat mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti kekurangan sumber

daya, perubahan kurikulum yang sering terjadi, dan kegagalan dalam penerapan kebijakan.

3. Kesadaran masyarakat: Kebijakan pendidikan yang menimbulkan pro dan kontra dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang pendidikan. Hal ini bisa mengakibatkan perbedaan pandangan dan kepentingan masyarakat, sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan yang diadopsi.

Meskipun demikian, penting untuk mempertimbangkan bahwa pemerintah dan pemangku kebijakan pendidikan sering kali mencoba melakukan perbaikan dan percobaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, perlu lebih bertindak dalam menerapkan kebijakan pendidikan yang dibuat, seperti melakukan kajian atau semacam percobaan sebelum benar-benar menerapkan kebijakan tersebut (Widyanto, 2011).

C. Pro dan Kontra Kebijakan Sekolah Pada Siswa yang Membawa Hp di Sekolah Mas Nur Adia

Dalam penelitian ini, peneliti menunjukkan bahwa guru dan wali murid sangat khawatir tentang siswa yang suka membawa ponsel pintar ke sekolah. Bahkan ada siswa yang memainkannya saat jam pelajaran, kadang-kadang disalahgunakan untuk menonton sesuatu yang tidak penting. Akibatnya, sekolah membuat kebijakan untuk mengatasi hal ini.

Menurut penelitian yang dilakukan di MAS Nur-Adia, wakil kepala sekolah bapak Gery mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang banyaknya siswa yang membawa ponsel pintar ke sekolah dan tidak banyak yang sering memakainya saat belajar. Pihak sekolah membuat kebijakan yang melarang atau siswa membawa Hp ke dalam lingkungan sekolah. Jika seorang siswa ditemukan membawa Hp di dalam ruang kelas, mereka akan dihukum.

Dan dengan kebijakan itu terjadilah pro dan kontra terhadap kebijakan sekolah tersebut yang mana pronya itu banyak pihak yang mendukung baik dari pihak guru, pihak orang tua dengan peraturan/kebijakan tersebut agar anak-anak lebih disiplin dan agar para siswa lebih fokus terhadap pelajaran.

Sedangkan kontra dari kebijakan tersebut yaitu ada juga sebagian orang tua dan murid yang menentang peraturan tersebut dengan alasan Hp tersebut digunakan untuk komunikasi dengan orang tua saat pulang sekolah dan alasan untuk belajar seperti presentasi di kelas.

Oleh karena itu pihak sekolah membuat dispensasi terhadap peraturan tersebut sesuai dengan beberapa keadaan tertentu seperti:

1. Hanya dipakai ketika pelajaran tersebut memerlukannya dalam belajar seperti presentasi dan kegiatan lainnya.
2. keperluan komunikasi dengan orang tua/wali untuk antar jemput dikarenakan jarak tinggal yg jauh dri sekolah.
3. Jika tidak diperlukan siswa tidak diperbolehkan memainkan hape tersebut.

KESIMPULAN

Dengan jaman teknologi sekarang banyak siswa yang membawa hape kedalam lingkungan, dan dengan itu pun pihak sekolah MAS Nur_Adia membuat kebijakan apabila ada siswa yang ketahuan membawa hap eke sekolah maka hape itu akan disita dan pemanggilan orang tua.

Kemudian dengan kebijakan itu mendatangkan pro dan kontra, yang mana dalam pronya itu banyak pihak yang mendukung baik dari pihak guru, pihak orang tua dengan peraturan/kebijakan tersebut agar anak-anak lebih disiplin dan agar para siswa lebih fokus terhadap pelajaran. Sedangkan kontra dari kebijakan tersebut ada juga sebagian orang tua dan murid yang menentang peraturan tersebut dengan alasan hape tersebut digunakan untuk komunikasi dengan orang tua saat pulang sekolah dan alasan untuk belajar sperti presentasi di kelas.

DAFTAR REFERENSI

- Ash-Shiddiqy, M. H. (2017). Pendidikan, Perubahan & Kebijakan. Jurnal : Syekh Nurjati, 3(5), 11-34.
- Hilal, S. (2012). Pro Kontra Perihal Kebijakan Permendikbudristek No. 30. Jurnal Adabiyah, 5(2), 1-9.
- Naufal, M. (2023). Studi Kultural Pro Kontra Wacana Full Day School. JUDIKA (JURNAL PENDIDIKAN UNSIKA), 4(1), 88-100.
- Sirojudin. (2019). Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan. Jurnal Administrasi Pendidikan UPI, 8(2), 1-17.
- Thabrani, A. M. (2011). Pro dan Kontra Kebijakan Merdeka Belajar. Jurnal Insan Cipta, 6(2), 30-41.
- Widyanto, A. (2011). Dampak kebijakan pendidikan gratis bagi kualitas pendidikan. Jurnal Dirosah Islamiyah, 10(2), 82-100.